Jurnal Cendekia Hukum Indonesia
Vol. 2 No. 2 Tahun 2026
Licensed CC BY-SA 4.0, Hal 489-509
DOI: https://doi.org/10.71417.v2i2.252.
https://hukum.journalpustakacendekia.com/index.php/JCHI

Solidaritas, Kepemimpinan, dan Kepentingan Strategis: Diplomasi Kemanusiaan Indonesia dalam Respons Gempa Myanmar 2025

Shakila Hana Luthfia[1], Asep Setiawan[2], Sri Yunanto[3], Ali Noer Zaman[4]
[1,2,3,4] Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Abstract. *The 7.7-magnitude earthquake that struck Myanmar on March 28, 2025, tested ASEAN's capacity to translate regional solidarity into a rapid and coordinated humanitarian response while remaining compatible with the principles of sovereignty and non-interference. This article examines Indonesia's humanitarian diplomacy through the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) and explains the relationship between operational capacity, institutional position, high-level political commitment, and strategic interests in shaping the response. The study employs a qualitative case study design based on document analysis and triangulation of secondary sources, including reports from the AHA Centre and ASEAN, official Indonesian government documents, international humanitarian reports, and academic literature published through 2026. The data are analyzed using the international organization framework of instrument, arena, and actor, alongside the concept of humanitarian diplomacy. The findings identify four key mechanisms: (1) Indonesia's technical capacity through the Indonesian Search and Rescue Team (INASAR), Emergency Medical Team, logistical resources, and ASEAN Emergency Response and Assessment Team (ASEAN-ERAT) personnel provided substantive operational support; (2) Indonesia's status as a founding member of ASEAN and host of the AHA Centre strengthened coordination without granting it full control over the regional organization; (3) the involvement of the President and Minister of Foreign Affairs connected the technical response with signals of regional leadership; and (4) humanitarian assistance generated legitimacy, enhanced Indonesia's reputation as a responsible regional actor, and reinforced ASEAN centrality. The Mandalay case demonstrates a layered model of humanitarian diplomacy—nationally enabled, regionally institutionalized, and diplomatically leveraged—indicating that solidarity and national interests can be mutually reinforcing when grounded in humanitarian principles and legitimate regional mechanisms.*

Keywords: *Humanitarian Diplomacy, AHA Centre, ASEAN, Indonesia, Disaster Response, 2025 Myanmar Earthquake.*

Abstrak. Gempa magnitudo 7,7 yang melanda Myanmar pada 28 Maret 2025 menguji kapasitas ASEAN untuk menerjemahkan solidaritas regional menjadi respons kemanusiaan yang cepat dan terkoordinasi, namun tetap kompatibel dengan prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Artikel ini menganalisis diplomasi kemanusiaan Indonesia melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre), serta menjelaskan hubungan antara kapasitas operasional, posisi institusional, komitmen politik tingkat tinggi, dan kepentingan strategis dalam

Received Oktober 30, 2026; Revised November 08, 2026; Accepted November 11, 2026
* Shakila Hana Luthfia, shakilahanaluthfia@gmail.com

respons tersebut. Penelitian menggunakan desain kualitatif studi kasus dengan analisis dokumen dan triangulasi sumber sekunder. laporan AHA Centre dan ASEAN, dokumen resmi Pemerintah Indonesia, laporan kemanusiaan internasional, serta literatur akademik hingga 2026 dianalisis melalui kerangka teori organisasi internasional (instrumen, arena, aktor) dan konsep diplomasi kemanusiaan. Temuan menunjukkan empat mekanisme utama: (1) kapasitas teknis Indonesia melalui INASAR, Emergency Medical Team, logistik, dan personel ASEAN-ERAT memberi substansi operasional; (2) status Indonesia sebagai negara pendiri ASEAN dan tuan rumah AHA Centre memperkuat koordinasi tanpa memberi kontrol penuh atas organisasi regional; (3) keterlibatan Presiden dan Menteri Luar Negeri menghubungkan respons teknis dengan sinyal kepemimpinan regional; dan (4) bantuan kemanusiaan menghasilkan legitimasi, reputasi sebagai *responsible regional actor*, dan penguatan sentralitas ASEAN. Kasus Mandalay memperlihatkan model diplomasi kemanusiaan berlapis *nationally enabled, regionally institutionalized, diplomatically leveraged* yang menunjukkan bahwa solidaritas dan kepentingan nasional dapat berjalan selaras selama tunduk pada prinsip kemanusiaan dan mekanisme regional yang sah.

Kata kunci: : Diplomasi Kemanusiaan, AHA Centre, ASEAN, Indonesia, Respons Bencana, Gempa Myanmar 2025.

LATAR BELAKANG

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan paparan bencana alam tertinggi di dunia. Risiko tersebut lahir dari kombinasi kondisi tektonik, kepadatan penduduk, urbanisasi cepat, ketimpangan kapasitas nasional, kerentanan sosial-ekonomi, dan peningkatan bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi perubahan iklim. Dalam konteks Indonesia, kajian sistematis menunjukkan bahwa riset bencana telah berkembang pesat setelah tsunami Samudra Hindia 2004, tetapi tantangan tata kelola, koordinasi, dan integrasi pengetahuan tetap menjadi agenda penting (Djalante, 2018). Pada tingkat regional, ASEAN merespons kerentanan bersama dengan membangun arsitektur kelembagaan yang semakin spesifik, terutama melalui ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) dan AHA Centre. Kerja sama ini mengubah bencana dari isu domestik menjadi bidang tata kelola regional yang melibatkan pertukaran informasi, kesiapsiagaan, penilaian cepat, mobilisasi aset, logistik, dan koordinasi dengan aktor internasional (Simm, 2018; Sari, 2022; Triyana et al., 2023).

Gempa Myanmar pada 28 Maret 2025 menjadi ujian paling aktual terhadap arsitektur tersebut. Gempa utama bermagnitudo 7,7 terjadi di sekitar Mandalay–Sagaing pada kedalaman sekitar 10 kilometer dan segera diikuti gempa susulan kuat. Dampaknya meluas ke Mandalay, Sagaing, Magway, Shan, Naypyidaw, dan Bago. Laporan OCHA

pada 18 April 2025 mencatat sekitar 3.700 kematian, 4.800 korban luka, dan 129 orang masih hilang; angka ini merupakan snapshot pada fase awal dan terus berkembang seiring pembaruan data (OCHA, 2025). Literatur pascabencana yang terbit pada 2025–2026 juga menegaskan tingkat kerusakan yang sangat besar dan kompleksitas kebutuhan medis, hunian, serta layanan dasar (Nang et al., 2025; Tsuboi et al., 2026). Karena skala dampak, fragmentasi kondisi politik, dan kebutuhan bantuan lintas batas, gempa ini bukan sekadar peristiwa geofisik, melainkan krisis kemanusiaan dan tata kelola regional.

AHA Centre bergerak cepat. Pada hari kejadian, Emergency Operations Centre (EOC) dinaikkan ke tingkat merah; pimpinan dan In-Country Liaison Team dikerahkan ke Myanmar; ASEAN Emergency Response and Assessment Team (ASEAN-ERAT), mekanisme Disaster Emergency Logistics System for ASEAN (DELSA), Urban Search and Rescue (USAR), dan Emergency Medical Team (EMT) dimobilisasi. Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa AHA Centre sudah berada di Myanmar pada hari setelah gempa dan menjadi salah satu simpul registrasi serta koordinasi penempatan tim medis asing (Nang et al., 2025). Respons tersebut penting secara institusional karena AHA Centre bekerja di ruang politik yang sensitif: ia harus memfasilitasi bantuan tanpa meniadakan otoritas pemerintah terdampak. Literatur tentang ASEAN menunjukkan bahwa kemampuan menjembatani kedaulatan dan kebutuhan kemanusiaan merupakan karakter khas regionalisme bencana Asia Tenggara (Cook, 2021; Suzuki, 2021; Caballero-Anthony, 2022).

Di dalam respons regional itu, Indonesia memiliki posisi yang menonjol. Indonesia bukan hanya negara pendiri ASEAN, tetapi juga negara tempat AHA Centre berkedudukan di Jakarta dan salah satu negara ASEAN dengan pengalaman besar dalam penanganan bencana. Kapasitas nasional yang dibangun setelah Aceh, Yogyakarta, Lombok, Palu, dan berbagai bencana lain memberi basis teknis bagi keterlibatan luar negeri. Literatur tentang kerja sama antarlembaga menunjukkan bahwa kapasitas respons tidak cukup ditentukan oleh aset semata, tetapi oleh kualitas jaringan, interoperabilitas, kepercayaan, dan mekanisme koordinasi (Bisri, 2016; Aggarwal & Carlson, 2021; Trias & Cook, 2022). Pada kasus Myanmar, Indonesia mengirim bantuan logistik, tim INASAR untuk operasi USAR, Emergency Medical Team, personel ASEAN-ERAT, dan delegasi lintas kementerian/lembaga. Menteri Luar Negeri Sugiono juga menghadiri pertemuan

darurat Menteri Luar Negeri ASEAN pada 29 Maret 2025, menghubungkan tindakan lapangan dengan dimensi diplomatik (Kementerian Luar Negeri RI, 2025).

Keterlibatan tersebut perlu dianalisis sebagai diplomasi, bukan semata-mata manajemen bencana. Diplomasi kemanusiaan berada pada persilangan antara norma kemanusiaan, politik luar negeri, akses kepada populasi terdampak, koordinasi institusional, dan penciptaan legitimasi. Cook (2021) menunjukkan bahwa Asia Tenggara telah menjadi laboratorium penting bagi diplomasi kemanusiaan karena negara tetap menjadi aktor utama, sementara organisasi regional membentuk ruang perantara bagi kerja sama. Cook dan Gong (2021a) menekankan bahwa aktivitas kemanusiaan negara tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari politik dan kepentingan nasional. Gong (2021), melalui kajian tentang image-building, bahkan menunjukkan bahwa bantuan kemanusiaan dapat berfungsi sebagai sumber reputasi dan citra positif. Artinya, analisis yang hanya menilai jumlah ton bantuan atau jumlah personel akan kehilangan dimensi politik yang menjelaskan mengapa suatu negara memilih saluran tertentu, mengangkat isu pada tingkat menteri, dan menautkan aksi kemanusiaan dengan identitas regional.

Literatur yang ada dapat dikelompokkan ke dalam empat rumpun. Pertama, studi tentang kelembagaan AADMER dan AHA Centre menilai efektivitas koordinasi, fungsi hukum, dan kapasitas regional (Simm, 2018; Sari, 2022; Triyana et al., 2023). Kedua, studi tentang regional humanitarian order menyoroti ketegangan antara lokalisasi ASEAN, norma global, dan prinsip non-intervensi (Spandler, 2022; Coe & Spandler, 2022; Suzuki, 2021). Ketiga, studi tentang diplomasi kemanusiaan Indonesia membahas Rohingya, Cyclone Mocha, serta penggunaan bantuan sebagai instrumen kebijakan luar negeri dan public diplomacy (Damayanti, 2020; Halim et al., 2022; Zakaria et al., 2024). Keempat, literatur yang sangat baru mulai mengkaji operasi pascagempa Myanmar 2025, termasuk koordinasi EMT dan delegasi Indonesia (Hidayat et al., 2025; Nang et al., 2025; Lee, 2026). Meskipun demikian, masih terbatas kajian yang secara eksplisit menghubungkan empat variable kapasitas operasional Indonesia, kedudukan institusional AHA Centre di Jakarta, komitmen politik tingkat tinggi, dan kepentingan strategis dalam satu kerangka diplomasi kemanusiaan.

Artikel ini mengisi celah tersebut melalui pertanyaan: bagaimana Indonesia menjalankan diplomasi kemanusiaan dalam respons terhadap gempa Mandalay Myanmar 2025 melalui AHA Centre, dan mekanisme apa yang menjelaskan keterkaitan antara

kontribusi operasional, posisi institusional, komitmen politik, serta kepentingan strategis Indonesia? Argumen utama artikel adalah bahwa efektivitas diplomasi kemanusiaan Indonesia tidak berasal dari satu faktor tunggal. Ia muncul dari kombinasi kemampuan nasional yang dapat segera dikerahkan, saluran regional yang memiliki legitimasi politik, dukungan eksekutif yang mengangkat prioritas bantuan, dan insentif reputasional untuk menunjukkan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, kasus Mandalay memperlihatkan bentuk diplomasi kemanusiaan yang berlapis: kapasitas nasional memungkinkan tindakan; AHA Centre menginstitusionalisasikan dan melegitimasi tindakan; sedangkan diplomasi tingkat tinggi mengubah respons teknis menjadi sinyal politik regional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal yang berfokus pada respons Indonesia terhadap gempa Mandalay Myanmar 2025 melalui AHA Centre. Studi kasus dipilih karena pertanyaan penelitian menuntut penjelasan proses, mekanisme, dan konteks, bukan pengukuran hubungan kausal secara statistik. Unit analisis adalah tindakan diplomasi kemanusiaan Indonesia yang diartikulasikan melalui mekanisme regional ASEAN, sedangkan unit observasi mencakup keputusan diplomatik, pengerahan personel, logistik, koordinasi institusional, dan dokumen situasi selama fase tanggap darurat utama setelah 28 Maret 2025.

Data bersumber dari dokumen sekunder yang dapat ditelusuri: situation update dan emergency response overview AHA Centre; pernyataan ASEAN dan AADMER; laporan OCHA; rilis BNPB, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Luar Negeri RI; serta artikel jurnal peer-reviewed yang ditelusuri dan diverifikasi melalui Sider Scholar dan Scite hingga 2026. Sumber media digunakan secara terbatas untuk merekonstruksi kronologi pengiriman bantuan ketika informasi yang sama dikonfirmasi atau konsisten dengan sumber resmi. Pendekatan ini mengikuti prinsip triangulasi sumber agar narasi tidak bertumpu pada satu institusi.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, data direduksi dan dikodekan menurut empat kategori yang berasal dari kerangka teori: kapasitas operasional, embeddedness institusional, komitmen politik, dan kepentingan strategis. Kedua, dilakukan process-oriented reconstruction untuk menelusuri urutan aktivasi AHA Centre, pengiriman tim Indonesia, keterlibatan pejabat tinggi, serta perluasan koordinasi regional.

Ketiga, bukti dibandingkan dengan literatur tentang AADMER, non-intervensi, regional humanitarian order, dan disaster diplomacy untuk menilai apakah kasus 2025 memperlihatkan kontinuitas atau perubahan.

Validitas ditingkatkan melalui cross-check antarjenis sumber dan perhatian pada temporal cut-off. Angka korban, personel, tonase bantuan, serta nilai bantuan dapat berubah antar-laporan karena pembaruan situasi dan perbedaan definisi. Karena itu, angka dalam artikel diperlakukan sebagai snapshot dari dokumen yang tersedia, bukan statistik final tunggal. Penelitian juga memiliki keterbatasan: tidak menggunakan wawancara langsung dengan pejabat Indonesia, AHA Centre, atau penerima bantuan di Myanmar. Konsekuensinya, artikel lebih kuat dalam menjelaskan desain institusional dan logika diplomatik daripada mengukur dampak bantuan pada tingkat rumah tangga. Keterbatasan ini penting mengingat kritik bahwa keberhasilan prosedural regional tidak otomatis identik dengan outcome kemanusiaan yang merata (Lee, 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gempa Mandalay 2025 dan Aktivasi Arsitektur Respons ASEAN

Gempa 28 Maret 2025 segera menghasilkan kebutuhan respons lintas sektor dan lintas negara. AHA Centre menaikkan status EOC menjadi merah dan mengonsolidasikan informasi dari Myanmar, Thailand, dan National Disaster Management Organisations negara anggota. Pada 29 Maret, pimpinan AHA Centre dan In-Country Liaison Team berada di Naypyidaw untuk berkoordinasi dengan Department of Disaster Management Myanmar. Selanjutnya, ASEAN-ERAT, USAR, EMT, dan DELSA diaktifkan. Hingga 23 April, dokumen respons AHA Centre mencatat 12 penerbangan kemanusiaan dengan nilai bantuan ASEAN sekitar USD 633.043,98. Rangkaian ini memperlihatkan bahwa AHA Centre bekerja sebagai “switchboard” regional: mengubah informasi bencana menjadi permintaan, penempatan, dan aliran aset.

Perkembangan tersebut menguatkan argumen bahwa pelembagaan regional memiliki nilai praktis. Tanpa prosedur yang telah disepakati sebelum bencana, setiap negara akan membutuhkan negosiasi bilateral yang lebih panjang mengenai izin masuk, standar tim, lokasi penempatan, dan koordinasi. Simm (2018) serta Triyana et al. (2023) menekankan fungsi AADMER dalam menyediakan kerangka legal dan prosedural, sedangkan Aggarwal dan Carlson (2021) menunjukkan pentingnya koordinasi yang dibangun sebelum onset bencana. Dalam kasus Myanmar, modal institusional tersebut

sangat relevan karena kondisi politik domestik membuat akses kemanusiaan menjadi sensitif. AHA Centre memberi format regional yang relatif dapat diterima: bantuan datang melalui mekanisme yang Myanmar sendiri ikut bentuk sebagai anggota ASEAN.

Akan tetapi, kecepatan koordinasi tidak boleh disamakan dengan kesempurnaan outcome. Lee (2026) menunjukkan adanya ketegangan normatif dalam tata kelola bencana ASEAN 2025: kepatuhan prosedural dan mobilisasi regional dapat berjalan bersamaan dengan kesenjangan distribusi di wilayah terdampak. Kritik ini mengingatkan bahwa indikator kinerja harus dibedakan menjadi output—jumlah penerbangan, tim, tonase, koordinasi—dan outcome—akses aktual, cakupan penerima, kontinuitas layanan, serta perlindungan kelompok rentan. Posisi artikel ini karena itu tidak menilai AHA Centre sebagai sepenuhnya efektif atau tidak efektif, melainkan sebagai institusi yang secara nyata mengurangi biaya koordinasi sambil tetap beroperasi dalam batas politik dan kapasitas lokal.

Kapasitas Operasional Indonesia sebagai Basis Diplomasi

Kontribusi Indonesia memperlihatkan hubungan langsung antara pengalaman domestik dan kapasitas diplomasi. Negara yang sering menghadapi bencana memiliki reservoir keahlian, personel, prosedur, dan organisasi yang dapat dialihkan ke operasi internasional. Djalante (2018) menunjukkan bahwa pengalaman bencana telah membentuk ekosistem pengetahuan dan tata kelola Indonesia, sementara Djalante dan Lassa (2019) menekankan pentingnya governance dalam pengurangan risiko bencana. Pada kasus Myanmar, kapasitas ini terwujud melalui INASAR, BNPB, BASARNAS, Emergency Medical Team, personel ASEAN-ERAT, serta dukungan kementerian dan organisasi lain.

Dokumen Pemerintah Indonesia menunjukkan pengerahan bantuan dalam beberapa tahap. Pada tahap awal, Indonesia mengirim logistik dan tim pendahuluan; pada 3 April, misi berikutnya membawa bantuan berskala besar dan tambahan personel. Kementerian Kesehatan melaporkan EMT berjumlah 35 tenaga kesehatan dengan bantuan medis dan obat-obatan senilai sekitar Rp5,5 miliar. Dokumen penelitian juga merangkum keterlibatan 157 personel pada keseluruhan misi, dengan unsur BNPB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, BASARNAS, TNI, BAZNAS, PMI, kementerian teknis, dan dukungan non-pemerintah. Angka tonase berbeda menurut tahap dan snapshot; sumber nasional menyebut bantuan tahap ketiga sekitar 124 ton dengan nilai

Rp20,89 miliar, sementara ringkasan kebijakan menyebut skala keseluruhan sekitar 124 ton dan sekitar USD1,2 juta. Perbedaan ini sebaiknya dibaca sebagai perbedaan basis pelaporan, bukan dijumlahkan secara otomatis.

Kapabilitas tersebut memberi diplomasi kemanusiaan "isi" material. Diplomasi tanpa aset berisiko menjadi deklaratif; aset tanpa koordinasi berisiko menghasilkan duplikasi. Bisri (2016) menunjukkan bahwa efektivitas bantuan sangat dipengaruhi oleh hubungan antarlembaga, sedangkan Trias dan Cook (2022) menekankan jaringan HADR sipil-militer. Dalam konteks Indonesia, whole-of-government membuat bantuan bersifat multidimensi: pencarian dan pertolongan, kesehatan, logistik, penilaian, dan diplomasi berjalan dalam satu paket. Hidayat et al. (2025) menemukan bahwa komunikasi dan kolaborasi menjadi inti kinerja delegasi Indonesia, sehingga memperkuat interpretasi bahwa kapasitas bukan sekadar jumlah personel, melainkan kemampuan mengintegrasikan banyak organisasi.

Secara teoretis, kemampuan ini mengangkat Indonesia dari donor ad hoc menjadi enabling state dalam arsitektur regional. Negara tidak menggantikan AHA Centre, tetapi memasok sebagian sumber daya yang memungkinkan mekanisme regional bekerja. Hubungan ini bersifat komplementer: AHA Centre memberi legitimasi, prosedur, dan common operating picture; Indonesia memberi personel, pengalaman, dan aset. Pola ini mendekati konsep regionalisasi fungsi kemanusiaan, yakni ketika kapasitas nasional menjadi building block bagi respons kolektif ASEAN (Cook, 2021; Sari, 2022).

Tabel 1. Tahapan dan Dimensi Kontribusi Indonesia dalam Respons Myanmar 2025

Waktu	Bentuk kontribusi	Dimensi	Makna analitis
31 Maret 2025	Tahap awal bantuan/logistik sekitar 12 ton	Logistik	Respons cepat dan sinyal solidaritas
1 April 2025	Tim pendahuluan sekitar 39 personel	Assessment/koordinasi	Mempersiapkan deployment dan liaison
3 April 2025	Bantuan tahap III sekitar 124 ton; nilai dilaporkan Rp20,89 miliar; tambahan personel	Logistik + operasional	Peningkatan skala bantuan
Fase tanggap darurat	Emergency Medical Team 35 tenaga kesehatan; bantuan kesehatan sekitar Rp5,5 miliar	Kesehatan	Humanitarian service delivery
Fase tanggap darurat	INASAR/BASARNAS untuk USAR	Pencarian dan pertolongan	Kontribusi capability-specific

Fase tanggap darurat	Personel Indonesia dalam ASEAN-ERAT dan koordinasi AHA Centre	Regional	Integrasi kapasitas nasional ke mekanisme ASEAN
29 Maret dan sesudahnya	Menlu RI dalam pertemuan darurat ASEAN; koordinasi lintas kementerian/lembaga	Diplomatik/politik	Political authorization dan leadership signal

Catatan: angka merupakan snapshot dari sumber resmi/nasional pada fase respons dan dapat tumpang tindih antar-tahap; tidak dijumlahkan sebagai satu total tanpa harmonisasi definisi. Sumber: AHA Centre (2025a, 2025b, 2025c); BNPB (2025); Kementerian Kesehatan RI (2025); Kementerian Luar Negeri RI (2025).

AHA Centre di Jakarta: Kedekatan Institusional tanpa Dominasi

Faktor kedua adalah kedudukan AHA Centre di Jakarta. Perjanjian pendirian AHA Centre menetapkan Jakarta sebagai tempat kedudukan organisasi, sehingga Indonesia memiliki hubungan host-country yang lebih intens dibanding negara anggota lain dalam aspek fasilitas, hubungan administratif, dan ekosistem kelembagaan. Kedekatan tersebut memiliki makna praktis karena BNPB, kementerian/lembaga, dan AHA Centre berinteraksi dalam lingkungan institusional yang sama. Namun, penting untuk tidak mengubah fakta geografis ini menjadi klaim kontrol politik. AHA Centre tetap merupakan organisasi ASEAN yang governed by member states melalui ASEAN Committee on Disaster Management, bukan lembaga nasional Indonesia.

Dari perspektif organisasi internasional, posisi host menciptakan embeddedness, bukan dominasi. Embeddedness meningkatkan frekuensi interaksi, familiarity, dan peluang koordinasi, tetapi keputusan operasi tetap bergantung pada mandat regional dan persetujuan negara terdampak. Temuan ini sejalan dengan Suzuki (2021), yang menunjukkan bahwa AHA Centre merupakan focal point bagi negara anggota, organisasi internasional, dan mitra eksternal, serta dengan Cook (2021), yang menekankan bahwa aktivitas AHA Centre tetap berada dalam kerangka state-based humanitarian action. Dengan kata lain, keuntungan Indonesia adalah institutional proximity.

Kedekatan institusional juga membantu menjelaskan mengapa Indonesia memiliki insentif kuat untuk memastikan kredibilitas AHA Centre. Bagi negara tuan rumah, kinerja organisasi regional yang berkedudukan di wilayahnya dapat menghasilkan reputational spillover. Jika AHA Centre mampu mengkoordinasikan krisis besar, Indonesia ikut memperoleh manfaat sebagai negara yang diasosiasikan dengan infrastruktur regional yang berfungsi. Sebaliknya, kegagalan berulang dapat mengurangi daya tarik narasi

kepemimpinan ASEAN. Coe dan Spandler (2022) membantu menjelaskan dimensi ini: mekanisme bencana memiliki fungsi politik berupa reproduksi legitimasi dan otoritas regional. Karena itu, dukungan Indonesia kepada AHA Centre dapat dipahami sekaligus sebagai kewajiban solidaritas dan investasi pada institusi regional yang memperkuat posisi diplomatik Indonesia.

Komitmen Politik Tingkat Tinggi dan Whole-of-Government Diplomacy

Faktor ketiga adalah komitmen politik tingkat tinggi. Pada 29 Maret 2025, Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan darurat Menteri Luar Negeri ASEAN mengenai gempa Myanmar dan Thailand. Keterlibatan ini penting karena menghubungkan level teknis penanggulangan bencana dengan level politik luar negeri. Bantuan kemudian dilepas melalui koordinasi pemerintah pusat dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Komitmen eksekutif berfungsi sebagai political authorization yang memungkinkan mobilisasi lintas birokrasi dilakukan lebih cepat dan memberi sinyal kepada ASEAN bahwa respons Myanmar merupakan prioritas.

Dalam diplomasi kemanusiaan, sinyal politik memiliki setidaknya tiga fungsi. Pertama, reassurance kepada negara terdampak bahwa bantuan bukan instrumen tekanan politik. Kedua, mobilization signal kepada birokrasi nasional agar aset dapat disiapkan dan dikirim. Ketiga, leadership signal kepada negara anggota dan mitra bahwa Indonesia bersedia memikul biaya kolektif. Cook dan Gong (2021a) menunjukkan bahwa aktor negara tetap berperan penting dalam humanitarian diplomacy karena keputusan akses dan sumber daya tidak dapat sepenuhnya didepolitisasi. Ratajczak dan Broś (2023) juga menunjukkan bahwa praktik kemanusiaan dapat menjadi bagian dari positioning negara.

Pola whole-of-government pada kasus Myanmar memperluas basis diplomasi dari Kementerian Luar Negeri ke lembaga teknis. Hal ini konsisten dengan perkembangan diplomasi modern: isu kemanusiaan, kesehatan, bencana, dan logistik membuat kementerian teknis serta aktor non-negara menjadi diplomatic agents secara fungsional. EMT, tim USAR, dan personel ERAT mungkin tidak menjalankan negosiasi diplomatik formal, tetapi keberhasilan atau kegagalan mereka memengaruhi persepsi terhadap negara pengirim. Diplomasi karenanya tidak hanya terjadi di meja perundingan, tetapi juga di titik distribusi, rumah sakit lapangan, pusat koordinasi, dan mekanisme pertukaran data.

Walaupun demikian, politisasi bantuan harus dihindari. Gong (2021) mengingatkan bahwa upaya image-building hanya kredibel jika tindakan kemanusiaan dipersepsikan

konsisten dengan kebutuhan penerima. Jika bantuan terlalu dipromosikan sebagai prestasi nasional atau dikaitkan dengan syarat politik, legitimasi humanitariannya dapat melemah. Karena itu, keunggulan saluran AHA Centre adalah kemampuan untuk "menurunkan suhu" politik: bantuan Indonesia dilekatkan pada kerangka ASEAN, bukan tampil semata sebagai proyeksi bilateral terhadap Myanmar.

Kepentingan Strategis, Legitimasi, dan Sentralitas ASEAN

Faktor keempat adalah kepentingan nasional dan reputasi regional. Bantuan kemanusiaan sering digambarkan sebagai tindakan altruistik, tetapi literatur menolak anggapan bahwa kepentingan dan kemanusiaan selalu berlawanan. Disaster diplomacy mempelajari apakah kegiatan terkait bencana dapat mengubah atau memfasilitasi hubungan politik (Whittaker et al., 2018; Sudirman & Putra, 2018). Humanitarian diplomacy menambahkan dimensi akses, persuasi, norma, dan kemitraan (Cook, 2021). Dalam kerangka ini, Indonesia dapat mengejar manfaat reputasional selama tujuan utama operasi tetap pemenuhan kebutuhan kemanusiaan.

Setidaknya terdapat tiga kepentingan strategis. Pertama, legitimasi sebagai regional responsible actor. Dengan mengirim kapasitas yang nyata, Indonesia menunjukkan willingness to provide regional public goods. Kedua, penguatan sentralitas ASEAN. Penggunaan AHA Centre menegaskan bahwa ASEAN tetap relevan sebagai first responder dan platform koordinasi, terutama pada isu yang lebih operasional dibanding konflik politik. Ketiga, pemeliharaan hubungan dengan Myanmar tanpa mengabaikan sensitivitas politik. Saluran multilateral memungkinkan Indonesia terlibat pada kebutuhan manusia sekaligus mengurangi persepsi intervensi terhadap urusan domestik.

Aspek ketiga sangat penting mengingat pengalaman ASEAN dengan Myanmar. Papp (2023) dan Suzuki (2021) menunjukkan bahwa dalam konteks Myanmar, regional trust dapat membuka ruang yang lebih sempit bagi aktor eksternal. Maulana dan Newman (2022) menunjukkan bahwa norma kedaulatan di Asia Tenggara tetap kuat dalam isu perlindungan. Dalam kondisi ini, bantuan bencana melalui AHA Centre merupakan bentuk strategic multilateralism: Indonesia memperoleh ruang bertindak melalui institusi yang diterima Myanmar dan dibentuk bersama oleh anggota ASEAN. Keuntungan ini membedakan respons regional dari model intervensi kemanusiaan yang lebih koersif.

Namun, reputasi tidak boleh menjadi indikator utama keberhasilan. Literatur tentang humanitarian order mengingatkan bahwa organisasi regional dapat terjebak pada

performative regionalism—menunjukkan koordinasi dan simbol solidaritas tanpa memastikan distribusi yang cukup (Spandler, 2022; Lee, 2026). Karena itu, kepemimpinan Indonesia seharusnya dinilai dari kombinasi input, process, output, dan outcome. Input meliputi aset dan dana; process meliputi koordinasi dan kepatuhan pada prinsip kemanusiaan; output meliputi tim, penerbangan, dan layanan; outcome meliputi akses, cakupan, keselamatan, serta pemulihan penerima. Kerangka seperti ini menghindari klaim berlebihan bahwa jumlah bantuan otomatis sama dengan efektivitas diplomasi.

Sintesis: Model Diplomasi Kemanusiaan Berlapis

Kasus Mandalay menghasilkan sintesis teoretis yang lebih luas. Pertama, AHA Centre mengonfirmasi bahwa organisasi regional dapat menjadi lebih dari arena konsultasi. Aktivasi EOC, deployment ASEAN-ERAT, DELSA, dan koordinasi EMT menunjukkan agency operasional yang nyata, meskipun tetap dibatasi mandat negara anggota. Ini mendukung pendekatan organisasi internasional yang melihat agency sebagai bertingkat, bukan absolut. AHA Centre memiliki discretion teknis dalam kerangka yang telah didelegasikan, sementara keputusan politik dasar tetap berada pada pemerintah terdampak dan negara anggota.

Kedua, diplomasi kemanusiaan Indonesia bekerja melalui institutional multiplication. Satu tindakan—misalnya pengiriman EMT—menghasilkan beberapa fungsi sekaligus: memenuhi kebutuhan medis, memperkuat operasi AHA Centre, menunjukkan kapasitas Indonesia, dan memproduksi reputasi. Karena itu, dampak diplomasi tidak berdiri setelah operasi kemanusiaan selesai; ia dibentuk selama proses koordinasi. Model ini berbeda dari soft power yang semata-mata menekankan attraction. Diplomasi kemanusiaan lebih transaksional dan institusional: reputasi muncul dari kompetensi, keandalan, dan kemampuan bekerja di bawah aturan bersama.

Ketiga, kasus ini memperlihatkan pentingnya "layering" antara tingkat nasional dan regional. Kapasitas nasional tidak dilebur ke dalam ASEAN; sebaliknya, ASEAN memberi protokol yang menyatukan kapasitas berbeda tanpa menghilangkan kontrol nasional. Quayle (2013) menyebut ketegangan antara kewajiban nasional dan regional sebagai karakter penting ASEAN Socio-Cultural Community. Ramli dan Idris (2022) menjelaskan bagaimana institusionalisme liberal membantu memahami kerja sama keamanan non-tradisional ASEAN. Pada bencana 2025, layering tersebut justru menjadi

sumber fleksibilitas: Indonesia dapat bergerak sebagai negara berdaulat, tetapi tindakan memperoleh legitimasi tambahan ketika dikaitkan dengan mekanisme AADMER.

Keempat, kasus Mandalay menunjukkan bahwa non-intervensi bukan sekadar penghambat. Dalam desain tertentu, prinsip tersebut dapat menjadi condition of access. Karena bantuan dikemas sebagai respons teknis berdasarkan persetujuan dan mekanisme yang telah disepakati, Myanmar memiliki insentif lebih besar untuk menerima koordinasi ASEAN. Ini tidak berarti non-intervensi selalu normatif positif; pada situasi konflik atau pembatasan bantuan, prinsip yang sama dapat menghambat akses. Lee (2026) mengingatkan adanya compliance-harm paradox: kepatuhan terhadap struktur regional dapat berjalan seiring kekurangan bantuan pada komunitas tertentu. Karena itu, ASEAN memerlukan mekanisme evaluasi yang menghubungkan sovereignty-sensitive coordination dengan kebutuhan kemanusiaan berbasis data.

Implikasi kebijakan bagi Indonesia adalah memperkuat profesionalisasi diplomasi kemanusiaan. Pertama, perlu standing inter-agency protocol yang menghubungkan Kemlu, BNPB, BASARNAS, Kemenkes, TNI, dan aktor masyarakat sipil untuk deployment internasional. Kedua, Indonesia dapat menggunakan posisi host AHA Centre untuk mendorong interoperabilitas data, latihan bersama, dan roster personel, bukan untuk mencari privilese nasional. Ketiga, evaluasi pascamisi perlu memasukkan indikator penerima manfaat, akses ke kelompok rentan, gender, disabilitas, dan kontinuitas layanan. Mardialina et al. (2024) menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis gender dalam operasi AHA Centre. Keempat, diplomasi kemanusiaan harus dijaga dari narasi self-congratulation yang berlebihan; transparansi data dan evaluasi independen akan membuat soft power lebih kredibel.

Dengan demikian, kontribusi Indonesia pada 2025 paling tepat dipahami sebagai diplomasi kemanusiaan yang nationally enabled, regionally institutionalized, and diplomatically leveraged. “Nationally enabled” berarti kapasitas datang dari pengalaman, personel, dan organisasi nasional. “Regionally institutionalized” berarti tindakan diproses melalui AADMER/AHA Centre yang memberi standar, koordinasi, dan legitimasi. “Diplomatically leveraged” berarti bantuan memperoleh arti politik melalui keterlibatan pejabat tinggi dan reputasi kepemimpinan. Ketiga lapisan ini menjelaskan mengapa Indonesia dapat berkontribusi signifikan tanpa mengubah AHA Centre menjadi instrumen nasional dan tanpa menjadikan bantuan sebagai intervensi politik langsung.

Tabel 2. Sintesis Mekanisme Diplomasi Kemanusiaan Indonesia

Mekanisme	Indikator kasus	Efek diplomatik	Literatur pendukung
Kapasitas operasional	INASAR, EMT, logistik, ASEAN-ERAT	Membuat solidaritas dapat dieksekusi	Bisri, 2016; Trias & Cook, 2022
Embeddedness institusional	Pendiri ASEAN, host AHA Centre, jaringan NDMO	Mengurangi biaya koordinasi dan meningkatkan familiarity	Cook, 2021; Suzuki, 2021
Komitmen politik	Presiden/Menlu, whole-of-government	Political authorization dan leadership signal	Cook & Gong, 2021a; Ratajczak & Broś, 2023
Kepentingan strategis	Legitimasi, reputasi, ASEAN centrality	Mengubah kontribusi kemanusiaan menjadi reputational capital	Gong, 2021; Coe & Spandler, 2022
Kendala	Non-intervensi, akses, konflik domestik, distribusi	Membatasi hubungan output–outcome	Loh, 2016; Lee, 2026

Sumber: Sintesis Penulis

Kontribusi Teoretis dan Implikasi Kebijakan

Temuan kasus Myanmar juga memiliki implikasi terhadap perdebatan mengenai keamanan manusia, resiliensi regional, dan transformasi tata kelola bencana ASEAN. Bencana alam merupakan ancaman non-tradisional yang dampaknya dapat melampaui batas negara, mengganggu sistem kesehatan, mobilitas, ekonomi lokal, dan legitimasi pemerintah. Rahmadewi dan Sudirman (2021) menunjukkan bahwa bencana semakin ditempatkan dalam agenda security community ASEAN, sedangkan Puspita (2020) menyoroti dilema mekanisme ASEAN ketika norma kedaulatan berhadapan dengan tuntutan human security. Dalam konteks ini, AHA Centre mempunyai fungsi yang melampaui distribusi logistik: ia ikut membangun ekspektasi bahwa negara anggota memiliki kewajiban untuk saling membantu melalui prosedur yang sudah disepakati. Huang (2019) menunjukkan bahwa dimensi kemanusiaan telah tumbuh menjadi komponen kelembagaan ASEAN Community, bukan lagi tambahan periferal.

Bagi Indonesia, perkembangan tersebut memperluas makna kepemimpinan regional. Kepemimpinan tidak harus selalu berbentuk agenda-setting pada isu politik-keamanan. Penyediaan regional public goods kapasitas SAR, tenaga medis, logistik, data, dan koordinasi dapat menjadi bentuk kepemimpinan yang lebih konkret dan lebih mudah diterima dalam kultur ASEAN. Pendekatan ini juga mengurangi risiko bahwa diplomasi

Indonesia dipersepsikan sebagai hegemonic leadership. Indonesia memperoleh pengaruh melalui usefulness dan reliability, bukan melalui paksaan. Literatur mengenai diplomasi bencana Indonesia pada krisis lain menunjukkan bahwa ruang kemanusiaan dapat membantu mempertahankan engagement ketika isu politik formal mengalami kebuntuan (Fathun & Dwifarhani, 2023; Ahmed, 2025).

Sisi lain yang perlu diperkuat adalah humanitarian supply chain. Respons regional tidak hanya membutuhkan political consent, tetapi juga rantai pasok yang tahan guncangan, standar kesehatan yang interoperabel, dan kejelasan prosedur bea masuk serta distribusi. Liu dan Anbumozhi (2021) menunjukkan pentingnya pendekatan supply-chain untuk ketahanan layanan kesehatan ASEAN, sementara Kunz dan Reiner (2016) memperlihatkan bagaimana pembatasan pemerintah dan birokrasi dapat mengurangi kecepatan bantuan internasional. Dengan demikian, diplomasi kemanusiaan seharusnya tidak dipandang sebagai aktivitas komunikasi setelah bantuan dikirim; negosiasi prosedur logistik, izin masuk, data pasien, lokasi fasilitas, dan handover juga merupakan praktik diplomatik.

Kasus Myanmar juga menuntut perhatian pada dimensi sosial dan proteksi. Pengalaman regional dalam isu Rohingya menunjukkan bahwa solidaritas lintas masyarakat belum otomatis menghasilkan perlindungan yang konsisten ketika kerangka hukum regional lemah (Missbach & Stange, 2021). Pelajaran tersebut relevan untuk bencana: operasi harus memastikan bahwa akses tidak hanya menjangkau wilayah yang secara administratif mudah dicapai. Pendekatan gender, disabilitas, usia, status pengungsian, dan kebutuhan kelompok rentan perlu menjadi indikator utama. Kritik Lee (2026) dan studi Mardialina et al. (2024) menunjukkan bahwa regionalisme kemanusiaan perlu bergerak dari success narrative yang berpusat pada institusi menuju evidence of inclusion yang berpusat pada manusia.

Teknologi data membuka peluang perbaikan. Vescovo et al. (2026) menunjukkan potensi pemanfaatan model bahasa besar untuk rapid disaster impact assessment berbasis media, meskipun verifikasi dan bias sumber tetap menjadi tantangan. Bagi ASEAN, teknologi semacam ini sebaiknya melengkapi, bukan menggantikan, ADINet, penilaian ASEAN-ERAT, data pemerintah terdampak, dan validasi lapangan. Indonesia dapat mendorong AHA Centre membangun protokol data fusion yang transparan: setiap angka diberi timestamp, asal sumber, tingkat kepercayaan, dan status verifikasi. Hal ini penting

karena perbedaan angka korban atau tonase bantuan pada fase darurat sering menghasilkan kebingungan analitis. Data governance yang lebih kuat akan meningkatkan kualitas keputusan dan kredibilitas diplomasi.

Secara keseluruhan, implikasi kebijakan kasus Mandalay bukan bahwa Indonesia harus "memimpin lebih keras", melainkan memimpin melalui institusionalisasi kapasitas. Prioritasnya adalah memperkuat roster deployable experts, interoperabilitas EMT/USAR, latihan lintas negara, pembiayaan cepat, sistem data, dan mekanisme evaluasi outcome. Arumbinang (2022) menunjukkan masih adanya dilema komitmen dan implementasi dalam tata kelola bencana ASEAN. Menutup gap tersebut merupakan bentuk diplomasi kemanusiaan jangka panjang: bukan hanya hadir setelah gempa, tetapi berinvestasi sebelum bencana agar respons regional semakin cepat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa respons Indonesia terhadap gempa Mandalay Myanmar 2025 merupakan contoh yang kuat mengenai bagaimana bantuan bencana bertransformasi menjadi diplomasi kemanusiaan melalui organisasi regional. Keterlibatan Indonesia tidak berhenti pada pengiriman barang. Ia mencakup pengerahan INASAR untuk USAR, Emergency Medical Team, personel ASEAN-ERAT, bantuan logistik, koordinasi whole-of-government, dan keterlibatan Menteri Luar Negeri dalam mekanisme darurat ASEAN. Tindakan tersebut berlangsung di dalam arsitektur AADMER dan AHA Centre yang mengurangi biaya koordinasi, menyediakan legitimasi regional, dan memfasilitasi akses dalam lingkungan politik Myanmar yang sensitif.

Empat mekanisme menjelaskan pola tersebut. Pertama, kapasitas teknis nasional memberi substansi pada diplomasi. Kedua, status Indonesia sebagai pendiri ASEAN dan negara tuan rumah AHA Centre menciptakan embeddedness institusional dan insentif untuk menjaga kredibilitas mekanisme regional, tanpa berarti Indonesia mengontrol AHA Centre. Ketiga, komitmen politik tingkat tinggi menghubungkan operasi teknis dengan sinyal kepemimpinan serta mempercepat mobilisasi antarlembaga. Keempat, respons kemanusiaan menghasilkan manfaat strategis berupa legitimasi, reputasi sebagai responsible regional actor, dan penguatan sentralitas ASEAN. Solidaritas dan kepentingan nasional karena itu tidak harus diposisikan sebagai oposisi biner; keduanya

dapat berjalan bersamaan jika kepentingan strategis diperoleh melalui tindakan yang benar-benar memenuhi prinsip dan kebutuhan kemanusiaan.

Secara teoretis, temuan memperkuat pandangan bahwa organisasi regional dapat berfungsi sekaligus sebagai instrumen, arena, dan aktor. AHA Centre mempunyai agency operasional, tetapi agency tersebut tertanam dalam kedaulatan negara anggota. Secara konseptual, kasus ini menghasilkan model diplomasi kemanusiaan berlapis: nationally enabled, regionally institutionalized, and diplomatically leveraged. Model tersebut membantu menjelaskan mengapa negara dengan kapasitas nasional besar dapat memperoleh efek diplomatik lebih tinggi ketika memilih saluran regional yang sah.

Artikel ini tetap memiliki keterbatasan karena bertumpu pada analisis dokumen dan belum mengukur pengalaman penerima bantuan secara langsung. Penelitian selanjutnya perlu melakukan wawancara dengan AHA Centre, BNPB, Kementerian Luar Negeri, anggota ASEAN-ERAT, tenaga medis, dan organisasi lokal Myanmar; membandingkan Indonesia dengan Singapura, Malaysia, atau Thailand; serta membangun indikator outcome untuk menguji apakah koordinasi regional benar-benar meningkatkan akses dan pemerataan bantuan. Bagi kebijakan Indonesia, prioritas ke depan adalah memperkuat protokol deployment lintas lembaga, interoperabilitas dengan AHA Centre, evaluasi berbasis penerima manfaat, serta transparansi data. Dengan langkah tersebut, diplomasi kemanusiaan dapat berkembang bukan hanya sebagai sumber citra, tetapi sebagai kontribusi nyata Indonesia terhadap tata kelola kawasan yang lebih tangguh, legitimate, dan berorientasi pada manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Aggarwal, V. K., & Carlson, M. (2021). Institutional coordination in disaster management in the Asia Pacific. *Natural Hazards Review*, *22*(3). https://doi.org/10.1061/(ASCE)NH.1527-6996.0000486

AHA Centre. (2025a). *Situation update no. 1: M7.7 earthquake in Myanmar and Thailand (28 March 2025)*. ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management.

AHA Centre. (2025b). *Situation update no. 3: M7.7 earthquake in Mandalay, Myanmar (1 April 2025)*. ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management.

AHA Centre. (2025c). *M7.7 earthquake in Myanmar – 2025: Emergency response overview*. ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management.

Ahmed, K. (2025). Rethinking humanitarian diplomacy for Myanmar's Rohingya crisis resolution: A critical analysis. *Journal of Peacebuilding & Development*, *21*(2), 237–260. https://doi.org/10.1177/15423166251407446

Archer, C. (2001). *International organizations* (3rd ed.). Routledge.

Arumbinang, M. H. (2022). Problems and dilemmas: ASEAN commitments in disaster management. *Indonesian Comparative Law Review*, *4*(1), 17–25. https://doi.org/10.18196/iclr.v4i1.13219

ASEAN. (2005). *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER)*. ASEAN Secretariat.

ASEAN Secretariat. (2025). *Changing disaster risk landscape due to climate change in ASEAN* (Trend Report DM-10). ASEAN.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025, April 1). *Tiba di Myanmar, tim misi kemanusiaan dari Indonesia langsung bekerja*. BNPB.

Barnett, M., & Finnemore, M. (2004). *Rules for the world: International organizations in global politics*. Cornell University Press.

Bisri, M. B. F. (2016). Comparative study on inter-organizational cooperation in disaster situations and impact on humanitarian aid operations. *Journal of International Humanitarian Action*, *1*(1). https://doi.org/10.1186/s41018-016-0008-6

Caballero-Anthony, M. (2022). The ASEAN way and the changing security environment: Navigating challenges to informality and centrality. *International Politics*. https://doi.org/10.1057/s41311-022-00400-0

Coe, B. N., & Spandler, K. (2022). Beyond effectiveness: The political functions of ASEAN's disaster governance. *Global Governance*, *28*(3), 355–381. https://doi.org/10.1163/19426720-02803002

Cook, A. D. B. (2021). Humanitarian diplomacy in ASEAN. *Asian Journal of Comparative Politics*, *6*(3), 188–201. https://doi.org/10.1177/20578911211019247

Cook, A. D. B., & Chen, C. (2022). Disaster governance and prospects of inter-regional partnership in the Asia-Pacific. *The Pacific Review*, *35*(3), 446–476. https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1841823

Cook, A. D. B., & Gong, L. (2021a). Humanitarian diplomacy in the Asia-Pacific: Part I. *Asian Journal of Comparative Politics*, *6*(3), 183–187. https://doi.org/10.1177/20578911211045668

Cook, A. D. B., & Gong, L. (2021b). Humanitarian diplomacy in the Asia-Pacific: Part II. *Asian Journal of Comparative Politics*, *6*(4), 313–314. https://doi.org/10.1177/20578911211058142

Damayanti, C. (2020). Humanitarian diplomacy for Indonesian public diplomacy in South East Asia. *Wacana Hukum*, *26*(2), 31–36. https://doi.org/10.33061/1.wh.2020.26.2.3877

Djalante, R. (2018). Review article: A systematic literature review of research trends and authorships on natural hazards, disasters, risk reduction and climate change in Indonesia. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, *18*(6), 1785–1810. https://doi.org/10.5194/nhess-18-1785-2018

Djalante, R., & Lassa, S. (2019). Governing complexities and its implication on the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction priority 2 on governance. *Progress in Disaster Science*, *2*, 100010. https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2019.100010

Djalante, R., Shaw, R., & DeWit, A. (2020). Building resilience against biological hazards and pandemics: COVID-19 and its implications for the Sendai Framework.

Progress in Disaster Science, *6*, 100080. https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100080

Fathun, L. M., & Dwifarhani, M. (2023). COVID-19 sebagai bencana global abad 21: Tinjauan disaster diplomacy. *Padjadjaran Journal of International Relations*, *5*(2), 91. https://doi.org/10.24198/padjir.v5i2.44944

Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. *International Organization*, *52*(4), 887–917.

Gong, L. (2021). Humanitarian diplomacy as an instrument for China's image-building. *Asian Journal of Comparative Politics*, *6*(3), 238–252. https://doi.org/10.1177/20578911211019257

Halim, A., Nuraygy H., A., & Suleman, Z. (2022). Indonesian government's strategy in humanitarian diplomacy to Myanmar in the Rohingya conflict in 2017. *Frequency of International Relations*, *4*(1), 108–143. https://doi.org/10.25077/fetrian.4.1.108-143.2022

Hidayat, M., Mirza, F. I., & Riyanto, B. (2025). Communication and collaboration model of Indonesian delegation in Myanmar earthquake humanitarian assistance. *Nyimak: Journal of Communication*, *9*(2), 217. https://doi.org/10.31000/nyimak.v9i2.14063

Huang, K.-B. (2019). The origins of the ASEAN Community's humanitarian component. *Chinese Journal of International Review*, *1*(1), 1950001. https://doi.org/10.1142/S263053131950001X

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025, April 3). *Pemerintah Indonesia kirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Myanmar*. Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025, March 29). *Menlu Sugiono hadiri pertemuan darurat Menlu ASEAN terkait gempa Myanmar*. Kementerian Luar Negeri RI.

Kunz, N., & Reiner, G. (2016). Drivers of government restrictions on humanitarian supply chains. *Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management*, *6*(3), 329–351. https://doi.org/10.1108/JHLSCM-04-2016-0009

Lee, S. (2026). Embedded normative tension in ASEAN disaster governance: The 2025 Myanmar earthquake as a revelatory case. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. https://doi.org/10.1177/18681034261455059

Liu, M., & Anbumozhi, V. (2021). Application of supply chain approach to improving hazard-resilient health services: Framework analysis for ASEAN and options of implementation. *Journal of Social and Economic Development*, *23*(S3), 582–600. https://doi.org/10.1007/s40847-020-00134-w

Loh, D. M. H. (2016). ASEAN's norm adherence and its unintended consequences in HADR and SAR operations. *The Pacific Review*, *29*(4), 549–572. https://doi.org/10.1080/09512748.2015.1022589

Mardialina, M., Anam, S., Karjaya, L. P., Hidayat, A., & Lestari, B. U. S. (2024). The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre): Examining gender-based approach in the 2018 Lombok earthquake. *Journal of ASEAN Studies*, *12*(2), 231–261. https://doi.org/10.21512/jas.v12i2.11367

Maulana, Z., & Newman, E. (2022). Contesting the Responsibility to Protect in Southeast Asia: Rejection or normative resistance? *Global Responsibility to Protect*, *14*(1), 37–74. https://doi.org/10.1163/1875-984X-14010001

Minear, L., & Smith, H. (Eds.). (2007). *Humanitarian diplomacy: Practitioners and their craft*. United Nations University Press.

Missbach, A., & Stange, G. (2021). Muslim solidarity and the lack of effective protection for Rohingya refugees in Southeast Asia. *Social Sciences*, *10*(5), 166. https://doi.org/10.3390/socsci10050166

Nang, M. H., Sim, G. G., Lee, P. S. Y., Ho, S. F., Boon, E. S. K., Jamil, A. K. B. M., Ng, K. C., & Quah, J. (2025). Field report of the Singapore Emergency Medical Team deployment following the 2025 Myanmar earthquake: Clinical and operational insights from a WHO Type-1 fixed facility. *Prehospital and Disaster Medicine*, *40*(6), 330–335. https://doi.org/10.1017/S1049023X25101593

Ningsih, S. T. (2025). Solidarity amidst disaster: A rational choice for ASEAN's resilience through the AHA Centre. *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, *8*(2), 90–104. https://doi.org/10.36624/jisora.v8i2.307

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2025, April 18). *Myanmar: Earthquake response – Situation report no. 3*. United Nations OCHA.

Papp, B. (2023). An analysis of ASEAN's Cyclone Nargis 2008 disaster diplomacy. *Asian International Studies Review*, *24*(1), 25–46. https://doi.org/10.1163/2667078X-BJA10024

Puspita, N. Y. (2020). ASEAN mechanism for human security problems in Southeast Asia: What's wrong? *Jurnal Dinamika Hukum*, *19*(2), 521. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2566

Quayle, L. (2013). National and regional obligations, the metaphor of two-level games, and the ASEAN Socio-Cultural Community. *Asian Politics & Policy*, *5*(4), 499–521. https://doi.org/10.1111/aspp.12068

Rahmadewi, A. P., & Sudirman, A. (2021). How ASEAN perceive natural disaster as part of security community agenda? *Jurnal Asia Pacific Studies*, *5*(2), 117–134. https://doi.org/10.33541/japs.v5i2.3780

Ramli, M. F., & Idris, H. (2022). Liberal institutionalism theory approach in ASEAN's security cooperation through regionalism. *Akademika*, *92*(1). https://doi.org/10.17576/akad-2022-9201-06

Ratajczak, M., & Broś, N. (2023). Humanitarian diplomacy: The case of Switzerland and Sweden. *Politeja*, *20*(1/82), 143–163. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.82.08

Sari, S. (2022). ASEAN mechanism in disaster management: A case study of disaster management in Indonesia 2010–2020. *Jurnal Global & Strategis*, *16*(1), 75–108. https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022.75-108

Simm, G. (2018). Disaster response in Southeast Asia: The ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response. *Asian Journal of International Law*, *8*(1), 116–142. https://doi.org/10.1017/S2044251316000205

Spandler, K. (2022). Saving people or saving face? Four narratives of regional humanitarian order in Southeast Asia. *The Pacific Review*, *35*(1), 172–201. https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1833079

Sudirman, A., & Putra, A. C. (2018). Disaster diplomacy as an alternative approach for Indonesia's instrument of foreign policy in ASEAN. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, *14*(1), 1–12. https://doi.org/10.26593/jihi.v14i1.2772.1-12

Suwandari, H. D., & Sugito, S. (2021). The strategy of Indonesian diplomacy efforts and national political interests in the ethnic Rohingya refugee conflict. *Indonesian*

Journal of Economics, Social and Humanities, *3*(2), 131–143. https://doi.org/10.31258/ijesh.3.2.131-143

Suzuki, S. (2021). Interfering via ASEAN? In the case of disaster management. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *40*(3), 400–417. https://doi.org/10.1177/18681034211016865

Trias, A. P. L., & Cook, A. D. B. (2022). Military humanitarian and disaster governance networks in Southeast Asia: Framework and analysis. *Disasters*, *47*(1), 205–241. https://doi.org/10.1111/disa.12542

Triyana, H. J., Harjono, N. P., & McDermott, R. (2023). Implementing the ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response for better coordination and simplification procedures. *Jambe Law Journal*, *5*(2), 147–205. https://doi.org/10.22437/jlj.5.2.147-205

Tsuboi, M., Sasaki, H., & Park, H. (2026). Managing indirect disaster-related deaths after the 2025 Myanmar earthquake: A public health proposal. *Journal of Public Health Research*, *15*(3). https://doi.org/10.1177/22799036261471212

Vescovo, R., Dong, X., & Wiguna, S. (2026). Leveraging LLMs for rapid disaster impacts assessment through news media: A case study of the 2025 Myanmar earthquake. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *141*, 106195. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2026.106195

Whittaker, C., Frühauf, A., & Burthem, S. J. (2018). A disaster diplomacy perspective of acute public health events. *Disasters*, *42*(S2). https://doi.org/10.1111/disa.12306

Zakaria, A., Widodo, P., & Kertopati, S. N. H. (2024). Indonesia's humanitarian diplomacy contribution to ASEAN security stability through the provision of Cyclone Mocha disaster relief in Myanmar. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, *3*(5). https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i5.845